

MENCEGAH KEMUNCULAN KONFLIK MASA DEPAN ANTARA PESILAT TERATE DAN WINONGO DI MADIUN

Oleh :

Anindita Nur Hidayah¹⁾, Yoga Rosmanto²⁾, Rivaldo Noval Putra Santosa³⁾, Agus Adriyanto⁴⁾

¹²³⁴Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Indonesia

¹Email: anindita.nh@gmail.com

²Email: yoga.drkunan@gmail.com

³Email: rivaldonoval@gmail.com

⁴Email: agus.adriyanto@idu.ac.id

Abstrak

Terbaginya perguruan silat di Madiun, yaitu antara SH Terate dan SH Winongo, memunculkan konflik hingga menimbulkan korban serta kerugian materiil. Bahkan, konflik antarpesilat ini sering kali merugikan masyarakat yang tidak memiliki hubungan apapun dengan konflik tersebut. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya resolusi konflik yang dapat dilakukan untuk mencegah kemunculan konflik sosial antara pesilat SH Terate dan SH Winongo yang mungkin terjadi lagi di masa depan. *Dynamic Framework for Conflict Prevention and Resolution* milik Dr. Ichsan Malik digunakan untuk menganalisis ini, untuk nantinya dapat dirumuskan alternatif resolusi konflik. Berdasar pada analisis dalam penelitian, ditemukan sumber konflik, pemicu, hingga akselerator dari konflik antarpesilat di Madiun tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, maka disimpulkan bahwa upaya untuk mencegah kemungkinan munculnya konflik di masa depan dititikberatkan kepada para sesepuh perguruan (baik pengurus, pelatih, ataupun warga perguruan), para pemangku kebijakan (pemda ataupun Pemkot Madiun), dan kelompok fungsional. Selain itu, penting bagi seluruh pihak untuk turut andil dalam mencegah terjadinya konflik antarpesilat ini, dengan bersatu dan menghilangkan ego masing-masing untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

Kata Kunci: resolusi konflik, konflik, pencak silat, *Dynamic Framework*

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan karya cipta dan budaya. Budaya yang dimiliki Indonesia sangat beragam dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari itu, setiap suku di Indonesia memiliki budaya dan kearifan lokal masing-masing, baik berupa agama, bahasa, nilai, kesenian, karya cipta, dan sebagainya (Kemendikbud, 2016). Dengan keberagaman budaya yang dimiliki, hal ini dapat menjadi sumber kekuatan atau bahkan menjadi sumber konflik bagi Indonesia. Salah satu budaya di Indonesia yang dikenal hingga di tataran internasional yaitu Pencak Silat, hingga UNESCO menetapkan Pencak Silat sebagai warisan budaya tak benda (Kemendikbud RI, 2020). Dengan itu, Indonesia kemudian berkomitmen untuk menjaga kelestariannya, diantaranya melalui pendidikan pencak silat yang tidak hanya fokus pada aspek olah raga/bela diri, namun sebagai bagian dari kurikulum seni dan budaya.

Salah satu perguruan silat dengan nama besar dan terkenal di Indonesia adalah Setia Hati (SH) yang didirikan oleh Ki Ngabehi Soerodiwiryo atau Eyang Suro. Perguruan ini pada awal didirikannya bernama Sedulur Tunggal Kecer (tahun 1903), hingga pada tahun 1917 berganti nama menjadi Setia Hati yang berpusat di Madiun – Jawa Timur (Prastya, 2016). Namun demikian, setelah Eyang Suro meninggal (1944), perguruan ini terbagi menjadi dua yaitu SH

Terate dan SH Winongo. Terbaginya perguruan silat ini kemudian memunculkan konflik baru hingga pada konflik kekerasan antarperguruan, bahkan sering menimbulkan korban serta kerugian materiil. Tidak hanya menimbulkan kerugian bagi kedua pihak yang terlibat, konflik antara pesilat SH Terate dan Winongo di Madiun sering kali merugikan masyarakat yang tidak memiliki hubungan apapun dengan konflik ini. Jenis konflik antarkedua perguruan ini adalah konflik Horizontal, yaitu terjadi antara masyarakat dengan masyarakat. Konflik sosial ini terkadang bereskalasi, namun ada kalanya meredam. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya resolusi konflik yang dapat dilakukan untuk mencegah kemunculan konflik antara pesilat SH Terate dan SH Winongo yang mungkin terjadi lagi di masa depan. *The Dynamic Framework for Conflict Prevention and Resolution* (Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik) milik Dr. Ichsan Malik kemudian digunakan untuk melakukan analisis guna memberikan alternatif resolusi konflik (Malik, 2017).

2. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Melalui metode ini, penulis mengeksplorasi masalah dengan adanya batasan-batasan, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan

informasi dari berbagai sumber (Jackson, 2012). Metode deskriptif sendiri merupakan salah satu metode dalam penelitian sosial yang mengarahkan peneliti untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan sebuah situasi. Walau demikian, metode penelitian ini tidak memberikan arahan kepada peneliti untuk menciptakan suatu prediksi yang akurat mengenai hasil penelitian maupun untuk membentuk sebuah kejadian sebab-akibat dari penelitian tersebut (Jackson, 2012). Hal tersebut berarti bahwa hasil penelitian bergantung pada proses penelitian yang berjalan di lapangan, dan tidak berpatok pada sebuah hipotesis penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, yang dimulai pada bulan Februari hingga Mei 2021. Dengan menggunakan Metode penelitian kualitatif deskriptif, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan seluruh keadaan yang ada pada saat tersebut, periode terjadinya isu yang diteliti (Jackson, 2012). Oleh karena itu, dalam menjawab pertanyaan permasalahan, penulis kemudian memasukkan sumber-sumber data guna memberikan analisis secara detail berdasarkan pada fenomena yang diteliti dalam konteks yang benar-benar ada dan nyata (Morgan, 2016). Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan studi literatur dengan mengumpulkan dokumen, buku, jurnal, artikel, dan surat kabar yang memuat informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian sebagai sumber data utama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik yang terjadi antara pesilat SH Terate dan SH Winongo ini berawal dari perbedaan pandangan dan pemikiran dari 2 (dua) murid Eyang Suro. Kedua murid tersebut bernama Ki Hadjar Hardjo Utomo yang pada tahun 1922 membentuk SH Terate atas restu dari Eyang Suro, dan RDH Suwarno yang mendaku meneruskan SH milik Eyang Suro dengan menambahkan “Winongo” yang merupakan nama desa di Madiun tempat Eyang Suro dikedirikan (Harnowo et al., 2018). Kedua murid tersebut saling mengklaim bahwa yang mereka anut adalah ajaran SH yang asli dari Eyang Suro, hingga konflik ini merambat ke pengikut masing-masing perguruan.

Konflik antar anggota kedua organisasi mulai memanas pada tahun 1990-an, ketika semakin bertambahnya anggota dari kalangan remaja dengan membawa sifat-sifat keremajaannya, seperti egois, berani, dan solider. Pada tahun 2000, konflik semakin tegang yang tidak hanya terjadi di Kota Madiun sebagai basis masa terbesar organisasi, namun juga mulai menyebar di wilayah lainnya, di mana banyak masyarakat yang dirugikan karena bentrokan antara pesilat Terate dan Winongo yang sering kali terjadi di jalan raya sehingga mengganggu lalu lintas, bahkan sampai masuk ke perkampungan warga (Surya, 2021). Konflik ini tidak hanya terjadi antara orang-orang dewasa dari anggota perguruan, namun juga pada

anggota yang masih berumur belasan tahun (usia SMP-SMA).

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu, konflik antara pesilat Terate dan Winongo ini terjadi hampir di setiap tahun. Pada tahun 2011 konvoi SH Winongo dilempari batu oleh massa SH Terate. Pada tahun 2012 bentrok terjadi dua kali yang meluas tidak hanya di wilayah Madiun tetapi juga di Kabupaten Ponorogo (Aziiz, 2015). Hal ini juga didukung dengan semakin bertambahnya jumlah anggota organisasi setiap tahunnya. Pada tahun 2013, bentrok besar terjadi tepatnya dijalur Ponorogo – Madiun hingga melibatkan polisi, di mana beberapa tokoh yang menjadi provokator kemudian diamankan/ditangkap. Perjalanan konflik anggota SH Terate dan SH Winongo terhitung mulai sejak pecahnya kedua organisasi yang menyebabkan munculnya konflik hingga saat ini (Surya, 2021).

Berdasar pada latar belakang masalah dan dinamika konflik di atas, dapat dipahami bahwa konflik sosial yang terjadi antara pesilat PSHT dan SH Winongo di Madiun ini berkepanjangan dan belum dapat diselesaikan hingga sekarang. Terlebih, hampir setiap tahun selalu terjadi konflik antara keduanya. Oleh karena itu, analisis konflik dengan menggunakan *Dynamic Framework* ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi akar konflik, aktor-aktor yang terlibat, upaya yang pernah dilakukan untuk menyelesaikan konflik, hingga alternatif yang dapat dilakukan untuk mencegah munculnya konflik di masa depan.

The Dynamic Framework for Conflict Prevention and Resolution milik Dr. Ichsan Malik digunakan dalam analisis penulisan ini guna memetakan konflik dan upaya penyelesaiannya. Selain itu, kerangka dinamis juga digunakan sebagai alat untuk mencegah kemuculan ataupun terjadinya konflik kembali. Dengan pemetaan ini, maka diharapkan terdapat penemuan untuk mencegah munculnya konflik di Madiun antara SH Terate dan SH Winongo di masa depan. Berdasar pada kerangka teori yang dimiliki oleh *Dynamic Framework*, setidaknya terdapat 5 (lima) elemen utama yang harus dianalisis atau dipetakan secara mendalam, yaitu: elemen eskalasi-deeskalasi konflik, faktor penyebab konflik, aktor konflik, pemangku kepentingan, dan kebijakan politik. Kelima elemen utama ini saling terkait sebagai satu sistem yang bersifat dinamis karena masing-masing elemen saling mempengaruhi.

Elemen pertama yang perlu dideteksi adalah eskalasi dan de-eskalasi konflik. Eskalasi konflik terjadi ketika perselisihan dan sengketa tidak dapat dihentikan hingga memicu terjadinya mobilisasi (Malik, 2014). Akibat terburuk dari skenario ini adalah terjadinya kekerasan massal dan bertambahnya korban jiwa. Berkaitan dengan konflik antar pesilat di Madiun – Jawa Timur, didapati bahwa konflik ini berada pada tahap eskalasi karena belum terdapat upaya untuk menciptakan dan membangun

perdamaian (*peace buliding*) antara dua pihak yang berkonflik. Bahkan, setiap tahun selalu terjadi bentrokan antarpesilat dari organisasi SH Terate dan SH Winongo. Berita terakhir, pada September 2020, perseteruan antara keduanya masih terjadi dengan adanya tawuran hingga aksi-aksi saling balas perusakan tugu dari masing-masing perguruan di Kota Madiun – Jawa Timur (Harianto, 2020).

Elemen kedua dari Kerangka Dinamis adalah berupa faktor konflik yang terdiri dari penyebab struktural, pemicu konflik, dan akselerator. Pemicu adalah peristiwa ekstrem yang tiba-tiba terjadi di tengah-tengah konflik serta dapat memperparah dan meningkatkan intensitas konflik, misalnya pembunuhan seorang tokoh penting (Malik, 2014). Elemen ini memuat akar dari konflik harus ditemukan agar penyelesaian dan upaya pencegahan yang dilakukan kemudian tepat sasaran. Sebab struktural dari konflik antarperguruan silat di Madiun berdasar pada penelitian terdahulu menemukan bahwa sebagian anggota DPRD Madiun merupakan anggota organisasi SH Terate maupun SH Winongo, di mana Ketua DPRD Kota Madiun sendiri adalah anggota dari SH Terate, dan Wakilnya adalah anggota organisasi SH Winongo (Harnowo et al., 2018). Hal ini berarti bahwa konflik ini masuk dalam komponen Politik dan pemerintahan.

Selain itu, sengketa antara dua perguruan ini juga muncul dalam aparaturnya keamanan, sehingga terjadi kecenderungan subjektifitas dalam penanganan berbagai kasus kerusakan yang melibatkan kedua komunitas perguruan pencak silat tersebut yang berdampak langsung pada kurang efektifnya upaya-upaya pembangunan perdamaian yang dilakukan oleh para aktor fungsional. Jika mundur lagi ke belakang (pada masa penjajahan Belanda), dua pihak yang berbeda pandangan mengenai ke-SH-an ini juga telah terjadi di tataran struktural. Pihak Eyang Suro sebagai pencetus lahirnya organisasi SH tidak bersedia jika SH digunakan sebagai alat perjuangan melawan penjajah sebagaimana yang diinginkan oleh Ki Hadjar Hardjo Utomo (yang merupakan salah satu murid dengan jiwa nasionalis), melainkan SH dalam aktivitasnya harus memegang erat asas persaudaraan bukan permusuhan (Harnowo et al., 2018).

Setelah penyebab struktural, elemen kedua dalam teori ini memberikan analisis pada pemicu konflik. Dalam kasus yang terjadi antara pesilat SH Terate dan SH Winongo di Madiun, kondisi yang kemudian memperburuk suasana dan memperkeruh konflik adalah klaim dari kedua murid Eyang Suro setelah wafatnya sang guru. Kedua murid Eyang Suro yaitu Ki Hadjar Hardjo Utomo (SH Terate) dan RDH Suwarno (SH Winongo) mengalami perdebatan mengenai ajaran SH yang asli dari Eyang Suro, dan klaim ini berlangsung turun-temurun hingga saat ini. Hal ini yang menyebabkan masalah kecil dari individu mengakar ke masalah kelompok, hingga

menimbulkan rasa gengsi dengan pengeklaiman ajaran tersebut (Puspitasari, 2010).

Selain penyebab struktural dan pemicu konflik, dalam elemen kedua *Dynamic Framework* ini terdapat pula faktor akselerator atau katalis yang mempercepat terjadinya konflik kekerasan (Malik, 2014). Akselerator konflik dalam isu bentrokan antarpesilat di Madiun ini dapat dianalisis melalui adanya anggota-anggota organisasi dari kalangan remaja dengan membawa sifat-sifat keremajaannya, seperti egois, berani, dan solider. Sehingga, klaim yang telah dipaparkan sebelum semakin menguat dalam diri masing-masing anggota perguruan ini (Surya, 2021). Hal ini yang kemudian berdampak langsung pada responsifnya para anggota dalam menanggapi gerak-gerik dari pihak yang lain, baik Terate responsif terhadap Winongo ataupun sebaliknya. Selain itu, jika ditarik ke belakang lagi, ternyata pada tahun 1980-an menjadi awal perubahan konflik ini menjadi konflik kekerasan, yaitu ketika salah satu anggota SH Winongo bernama Iwan sedang mengendarai motor dan tiba-tiba diserang menggunakan palu oleh orang tidak dikenal yang menggunakan pakaian serba hitam, yang diduga sebagai anggota SH Terate (Surya, 2021). Dari sana, mulai muncul keinginan untuk membalas kekerasan, yang masih berlangsung hingga saat ini (saling membalas).

Elemen selanjutnya dari teori ini, yaitu **elemen ketiga**, adalah aktor konflik yang terdiri dari provokator, kelompok rentan, dan kelompok fungsional. Provokator dapat dikatakan sebagai sutradara dari terjadinya konflik, di mana kelompok ini sangat didengarkan dan biasanya diterima begitu saja oleh kelompok-kelompok rentan yang merupakan kelompok yang mudah dimobilisasi dan secara emosi mudah diprovokasi. Situasi provokasi ini dapat segera dihentikan oleh kelompok fungsional, dimana aktor fungsional ini memiliki hubungan langsung dengan rencana aksi. Namun, kelompok ini sering mengalami kegagalan dalam menghentikan komunikasi dari provokator dan kelompok rentan. Akibatnya, kelompok rentan bisa dengan mudah dimobilisasi karena ketegangannya sudah tinggi. Jika ini terjadi, eskalasi konflik akan kembali meningkat (Malik, 2014).

Berdasarkan teori di atas, dapat dianalisis bahwa konflik antara pesilat SH Terate dan SH Winongo di Madiun ini memiliki provokator, yaitu pengurus dan anggota perguruan SH Terate dan SH Winongo. Dikatakan demikian karena para pengurus ini yang memiliki pengetahuan lebih tentang sejarah persengketaan dan memiliki akses dalam menyebarkan sejarah tersebut, berdasarkan versi dari masing-masing organisasi. Oleh karena itu, penuturan dari pengurus dan anggota organisasi memiliki kecenderungan untuk lebih diterima, terutama oleh anggota baru ataupun masyarakat luas. Kelompok rentan yang kemudian lebih mudah dimobilisasi adalah parapesilat, terutama anggota

baru, baik dari perguruan SH Terate ataupun SH Winongo. Polisi/aparatur keamanan di Kota Madiun kemudian menjadi kelompok fungsional yang memiliki peran besar dalam menghentikan pertikaian dan menciptakan perdamaian antarmasyarakat.

Dalam konflik ini, Polres Madiun secara prosedural melakukan tindakan represif dengan menerapkan hukum pidana jika terjadi tindak pidana seperti pengancaman dengan senjata tajam, untuk selanjutnya melakukan olah TKP dan penyelidikan. Penangkapan terhadap para pelaku pertikaian dilakukan oleh Polres Madiun setelah terdapat barang bukti, untuk kemudian dilakukan penuntutan dan para tersangka ditingkatkan statusnya menjadi terdakwa untuk disidangkan di sidang pengadilan (Wiranegara, 2020).

Selanjutnya, **elemen keempat** dari *Dynamic Framework* adalah pemangku kepentingan atau *stakeholder*. Pihak-pihak ini adalah aktor yang berkepentingan untuk melakukan normalisasi atau menciptakan situasi damai antara pesilat SH Terate dan SH Winongo di Madiun. Adapun dalam konflik antarpesilat ini yang menjadi pemangku kepentingan adalah terdiri dari Pemerintah Kota Madiun, Polisi, Militer, jurnalis, ilmuwan, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). *Stakeholder* di Madiun ini memiliki cita-cita bersama, yaitu untuk menciptakan Kota Madiun yang lebih damai, baik di bulan-bulan biasa ataupun di bulan Suro dalam penanggalan Jawa. Sering kali, bulan Suro menjadi puncak terjadinya konflik (Gustiana, 2013). Hal ini terjadi karena pada saat bulan Muharram/Suro, anggota kedua perguruan melakukan kegiatan takziah pada makam leluhur maupun pada saat masing-masing perguruan mengadakan acara Suran Agung. Pada saat inilah rentan terjadi gesekan antara kedua kubu hingga menimbulkan konflik yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan kenyamanan di Kota Madiun (Gustiana, 2013).

Elemen terakhir, yaitu **elemen kelima**, dari teori milik Dr. Ichsan Malik tersebut adalah “*political will*” dari pemerintah yang mengarah pada perdamaian (Malik, 2014). SH Terate dan SH Winongo adalah organisasi silat di Indonesia dengan jumlah anggota besar, terlebih di Madiun yang merupakan basis organisasi ini. Hal ini menarik bagi para elite politik, terutama ketika pilkada yang berhubungan dengan dukungan politik (Harnowo et al., 2018). Pengaruh kedua perguruan silat tersebut tidak hanya mampu untuk sekedar mempererat antar anggota kelompok, namun juga mampu mendongkrak massa dalam arena Pemilihan Legislatif ataupun Pemilihan Kepala Daerah. Walaupun terdapat undang-undang yang mengatur, biasanya pemerintah sendiri yang menjadi bagian dari masalah, sehingga konflik tidak kunjung selesai karena adanya kepentingan/*interest* (Malik, 2014).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi antara pesilat SH Terate dan SH Winongo di Madiun – Jawa Timur ini begitu dinamis. Dapat dikatakan demikian karena konflik yang awalnya terjadi antara individu, yaitu kedua murid Eyang Suro, kemudian bereskalasi menjadi konflik antarkelompok. Selain itu, perjalanan konflik ini begitu panjang yang dimulai sejak tahun 1940-an hingga saat ini dan semakin tegang pada tahun 1980-an ketika terjadi kontak fisik (kekerasan) antara anggota SH Winongo dengan orang tidak dikenal yang diduga adalah anggota SH Terate. Dari peristiwa tersebut, kemudian muncul keinginan untuk saling membalas, di mana hasrat untuk saling membalas tersebut masih berlangsung hingga saat ini, terakhir terjadi pada September 2020. Konflik ini belum dapat diselesaikan karena kelompok fungsional yang seharusnya dapat menyelesaikan konflik mengalami kegagalan dalam menghentikan komunikasi dari provokator dan kelompok rentan. Ditambah dengan adanya *political will* yang justru cenderung tidak memberikan pemecahan masalah, terlebih pada masa pilgub ataupun pilkada.

Melalui analisis dan pembahasan sebelumnya, dapat dipahami mengenai sumber konflik, pemicu, hingga akselerator dari konflik yang terjadi antara perguruan pencak silat Terate dan Winongo di Madiun. Adapun saran yang dapat disampaikan sebagai upaya pencegahan konflik di masa depan adalah dititikberatkan kepada:

- 1) Para sesepuh perguruan (baik pengurus, pelatih, ataupun warga perguruan) untuk lebih menekankan dan menanamkan kepada seluruh siswanya bahwa kita berada di bawah bendera yang sama, yaitu IPSI, maka kita besaudara. Selain itu, penting untuk ditekankan kepada para anggota baru mengenai nilai-nilai luhur, perdamaian, dan persaudaraan yang harus dimiliki oleh setiap pesilat.
- 2) Para pemangku kebijakan (pemda ataupun pemkot Madiun) untuk tidak “memanfaatkan” anggota organisasi SH Terate dan SH Winongo dalam upaya menarik massa politik, karena kondisi-kondisi perpolitikan seperti ini justru memperparah eskalasi konflik.
- 3) Kelompok fungsional harus lebih profesional dalam menjalankan tugasnya untuk menghentikan konflik, tidak subjektif meskipun termasuk dalam anggota SH Terate ataupun SH Winongo. Penindakan hukum yang tegas bagi para pelaku kekerasan ataupun para pemicu konflik ini penting dilakukan sebagai upaya deeskalasi konflik.

Penting bagi seluruh pihak turut andil untuk mencegah terjadinya konflik antarpesilat di Madiun ini. Terlebih, Pencak Silat telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, dan Indonesia dicatat sebagai negara pengusul dan bertanggung jawab untuk menjaga *sustainability* Pencak Silat sebagai

aset budaya. Oleh karena itu, kita sebagai pesilat baik dari perguruan apapun seyogyanya bersatu dan menghilangkan ego masing-masing untuk menciptakan perdamaian. Karena, tidak dapat dipungkir bahwa jumlah pesilat dan organisasi silat Indonesia di bawah naungan IPSI atau Ikatan Pencak Silat Indonesia begitu banyak, yaitu sekitar 840 perguruan, sehingga sangat potensial bagi Indonesia untuk membawa Pencak Silat Indonesia semakin dikenal dunia.

5. REFERENSI

- Aziiz, I. M. (2015). Solidaritas Kelompok Organisasi Pencak Silat Cabang Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosial Antropologi*, 5(2), 1–12.
- Gustiana, S. (2013). *Kajian Kriminologi Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Antar Anggota Perguruan Pencak Silat* (pp. 1–17). <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/225/191>
- Harianto, S. (2020). *Aksi Perusakan Tugu Pesilat Kembali Terjadi di Kota Madiun*. Detiknews, 19 September 2020. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5179766/aksi-perusakan-tugu-pesilat-kembali-terjadi-di-kota-madiun>
- Harnowo, S., Wahyudi, B., & Susilowati, N. (2018). Resolusi Konflik Sosial di Jawa Timur (Studi Kasus: Madiun Jawa Timur). In *Laporan Hasil Penelitian D-LPPM Nomor 40* (pp. 1–120).
- Jackson, S. L. (2012). *Research Methods and Statistics: A Critical Thinking Approach 4th Edition*. Wadsworth Cengage Learning.
- Kemendikbud. (2016). Analisis Kearifan Lokal Ditinjau dari Keragaman Budaya. *Pusat Data Dan Statistik Pendidikan Dan Kebudayaan (PDSPK)*, 1–67. http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_F9B76ECA-FD28-4D62-BCAE-E89FEB2D2EDB_.pdf
- Kemendikbud RI. (2020). *Pencak Silat Ditetapkan UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda*. Website Kemendikbud RI. <https://kemendikbud.go.id>
- Malik, I. (2014). *Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik*.
- Malik, I. (2017). *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*. Kompas.
- Morgan, S. J. (2016). Case Study Observational Research: A Framework for Conducting Case Study Research Where Observation Date Are the Focus. *Qualitative Health Research*. <http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1049732316649160>
- Prasty, A. (2016). *Konflik Kekerasan antara Pendekar Silat dalam Perspektif Sosiologi (Studi Konflik antar Pendekar Silat di Wilayah Madiun)*. 125–140.
- <http://repository.ut.ac.id/7989/1/FISIP201601-8.pdf>
- Puspitasari, Y. D. E. (2010). *Sejarah Pertikaian Dua Perguruan Pencak Silat di Madiun* (pp. 1–17). https://www.academia.edu/5378730/Sejarah_Pertikaian_Dua_Perguruan_Pencak_Silat_di_Madiun
- Surya, R. (2021). *Melacak Akar Konflik Abadi Dua Perguruan Silat Kenamaan Indonesia*. Website Vice, 19 Januari 2021. <https://www.vice.com/id/article/xgz78q/sejarah-konflik-perguruan-silat-setia-hati-terate-dan-tunas-muda-winongo-madiun>
- Wiranegara, I. M. J. (2020). Strategy Implemented by the Madiun Police Department in Conflict Management of Pencak Silat. *Dialetika*, 15(1), 41–48.